

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KOMUNISME DI INDONESIA

II.1. Awal Masuknya Komunisme Ke Indonesia Dan Pergerakannya

II.1.1. Awal Masuknya Komunisme

Awal masuknya ideologi komunisme ke Indonesia sejalan tidak pernah terlepas dari peranan seorang warga negara Belanda yang bernama Hendricus Josephus Franciscus Maria Sneevliet.²⁴ Pada awal masuknya ke Indonesia Sneevliet bekerja disalah satu harian di Surabaya yang bernama Soerabajasche Handelsbad sebagai staff redaksi di harian tersebut. Namun tidak lama berada di Surabaya, Sneevliet memutuskan untuk pindah ke Semarang dan bekerja sebagai sekretaris di salah satu maskapai dagang di kota tersebut. Pada saat itu kota Semarang merupakan pusat organisasi buruh kereta api Vereenigde van Spoor en Tramweg Personnel (VSTP)²⁵. Pada awalnya Sneevliet di sewa oleh VSTP sebagai propogandis bayaran untuk menyebarkan ajaran yang dianut oleh buruh tersebut. Melalui kesempatan inilah Sneevliet berkenalan dengan massa buruh sekaligus menyebarkan doktrin pertentangan kelas yang dianut oleh ideologi komunisme.

Sneevliet sadar betul bahwa keterkaitannya dengan VSTP merupakan sebuah peluang besar untuk menumbuhkembangkan ideologi komunisme di Indonesia. Pada bulan Juli 1914 bersama personil-personil yang tergabung dalam VSTP seperti P. Bergsma, J.A. Brandstedder, W.H. Dekker (pada saat itu menjabat sebagai sekretaris VSTP) memelopori berdirinya organisasi politik yang bersifat radikal, Indische Sosial Democratische Vereeniging (ISDV) atau Serikat Sosial Demokrat India. ISDV kemudian menerbitkan surat kabar Het Vrije Woord (suara kebebasan) sebagai media propaganda untuk menyebarkan

²⁴ Sneevliet adalah mantan ketua Serikat Buruh Nasional dan mantan pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di negeri belanda.

²⁵ VSTP merupakan Serikat Personel Kereta dan Trem yang telah berdiri sejak tahun 1908 di kota Semarang.

ajaran ajaran komunisme yang menjadi ideologi dari organisasi tersebut. Oleh karena anggota ISDV terbatas dikalangan orang orang Belanda, maka organisasi ini belum dapat menjamah dan mempengaruhi organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam (SI).²⁶ Usaha ISDV untuk mendapat simpati rakyat tidak berhasil, karena rakyat ISDV masih menjadi sebuah kesatuan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Sneevliet dan kawan-kawan sadar betul bahwa untuk mendapatkan simpati rakyat, ISDV harus mampu berbaur bersama orang-orang pribumi dan mendekati diri dengan kekuatan/pergerakan nasional yang sudah ada sebelumnya. Melalui organisasi buruh yang ada di Semarang, ISDV melakukan pendekatan dengan Sarekat Islam yang pada saat itu di pimpin oleh Oemar Said Tjokroaminoto. Sneevliet kemudian memanfaatkan watak anti kolonialisme dan kapitalisme yang dianut dalam SI untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda.

Setelah revolusi Rusia meletus pada tahun 1917 dan dimenangkan oleh kekuatan komunis, watak gerakan ISDV pun semakin radikal dan tak henti-hentinya untuk menyebarluaskan ajaran komunismenya. Para pemimpin ISDV semakin gencar untuk terus melakukan pendekatan diri terhadap para pemimpin SI di Semarang. Disamping itu, Sneevliet dan kawan-kawan juga melakukan propaganda sampai ke lingkungan angkatan perang. Sneevliet terus melakukan ceramah-ceramah politik yang tujuannya adalah menanamkan benih-benih komunisme di lingkungan tersebut. Kegiatan Sneevliet ini sepenuhnya dibantu oleh Branstedder dan van Burink. Atas kerjasama bersama rekan rekannya Sneevliet akhirnya berhasil menggagasi terbentuknya Raad van Matrozen en Mariniers (Dewan Kelasi dan Marinir), suatu organisasi di lingkungan militer yang bersifat radikal revolusioner. Gebrakan yang dilakukan Sneevliet pun diperkuat dengan di terbitkannya koran Soldaten en Mattrozekrant (koran serdadu dan kelasi) dalam lingkungan

²⁶ Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*, Jilid I, Jakarta, 1991, Hal. 6

militer. Isi koran ini selalu diwarnai dengan ide-ide komunisme yang mengedepankan ide-ide perjuangan kelas.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sneevliet ternyata tercium oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada bulan Desember 1918 Pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan untuk mengusir Sneevliet dari Hindia Belanda karena kegiatan yang dilakukannya dianggap mulai mengancam. Pada bulan Desember 1919 rekan Sneevliet Brandstedder juga mengalami hal yang sama diusir oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekalipun Sneevliet dan Brandstedder telah meninggalkan Hindia Belanda (Indonesia) namun usaha yang mereka lakukan selama ini telah menemukan hasilnya. ISDV akhirnya berhasil menyebarkan ajaran-ajaran komunisme di Semarang dan mempengaruhi pimpinan SI Semarang yang pada saat itu dipimpin oleh Semaun dan Darsono.

Setelah mendapatkan dukungan penuh dari SI Semarang, ISDV menjadi semakin kuat dan ajaran komunisme semakin dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 23 Mei 1920, tepatnya di gedung SI Semarang, ISDV sepakat mengganti namanya menjadi Perserikatan Komunis di Indie (PKI). Perubahan nama ini diperuntukan supaya organisasi ini lebih tegas dalam mengedepankan nama komunisme sebagai ideologi dari organisasi mereka selama ini. Semaun dipilih sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Beberapa tokoh ISDV yang orang belanda diangkat sebagai pendamping antara lain Bergsma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara dan A. Barrs sebagai salah satu anggotanya.²⁷ Sekalipun Semaun dan Darsono telah menjadi pimpinan PKI, namun mereka tetap menjadi pimpinan SI Semarang. Hal ini disebabkan karena pada saat itu CSI (Central Sarekat Islam) masih memperbolehkan anggotanya untuk menjadi anggota dari organisasi lain.

²⁷ Ibid, Hal.7

II.1.2. Pisau Komunisme Membelah Sarekat Islam (SI)

Diperbolehkannya keanggotaan ganda pada tubuh SI dilihat sebagai kesempatan besar bagi PKI untuk menyusup ke organisasi tersebut yang kemudian bertujuan untuk memecahnya. Hal ini dilakukan karena PKI menyadari bahwa pada saat itu SI merupakan sebuah organisasi pergerakan nasional yang besar dan kuat. Sehingga timbul keinginan diantara pimpinan PKI untuk menguasainya. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan PKI dalam tubuh SI terang saja membuat pimpinan CSI menjadi berang. CSI melihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PKI telah mengarah kepada sebuah ancaman keutuhan didalam tubuh SI sendiri. CSI kemudian menyadari bahwa yang menjadi penyebab pengaruh PKI begitu kuat dalam tubuh SI adalah karena SI memperbolehkan sistem keanggotaan rangkap, sehingga menjadi sangat mudah untuk disusupi oleh orang-orang yang bersal dari organisasi lain.

Pada bulan Oktober 1921 dilaksanakan kongres SI yang ke VI di Surabaya. Pada saat itu terjadi suasana panas mewarnai jalannya kongres karena adanya perdebatan yang terjadi diantara fraksi komunis yang diwakili oleh Darsono dan Tan Malaka dengan pimpinan SI pada saat itu Haji Agus Salim. Pada kongres tersebut kemudian diputuskan bahwa dilarangnya keanggotaan rangkap. Artinya anggota SI tidak lagi boleh menjadi anggota dari organisasi lain, jadi bagi anggota yang selama ini merangkap sebagai anggota dari organisasi lain harus memilih antara SI atau organisasi lainnya tersebut. Keputusan ini sontak mendapat perlawanan dari faksi komunis karena hal tersebut akan sangat merugikan bagi mereka.

Sadar bahwa keluar dai SI merupakan sesuatu yang akan sangat merugikan bagi kekuatan PKI, maka Semaun selaku ketua PKI dan SI Semarang pada saat itu menolak keputusan kongres dan justru menghimpun kekuatan didalam tubuh SI. Semaun kemudian melakukan propaganda dalam tubuh SI dan mengatakan bahwa apa yang telah diputuskan

dalam kongres merupakan sebuah sesuatu yang keliru dan oleh sebab itu harus di tinjau kembali keputusannya. Namun, pimpinan SI pada saat itu tetap bersikeras pada apa yang telah diputuskan dalam kongres. Dengan keputusan tersebut maka anggota-anggota SI yang tidak mau keluar dari PKI dikeluarkan dari tubuh SI. Sekalipun keputusan ini akan mengurangi jumlah anggota, namun pimpinan SI tetap menganggap bahwa keputusan ini merupakan hal terbaik yang harus dilakukan.

Semaun dan para anggota SI yang juga merupakan PKI tidak tinggal diam dengan keputusan ini. Mereka tetap tidak mau menerima hasil kongres dan tidak keluar dari SI. Mereka kemudian membentuk SI tandingan yang disebut sebagai SI Merah, sedangkan SI yang menerima hasil kongres tersebut dinamakan sebagai SI Putih. SI tandingan ini tidak hanya terjadi ditingkat pusat, melainkan juga sampai ke cabang di daerah-daerah. Pada kongres PKI II di Bandung Maret 1923 dirumuskan secara jelas bahwa mereka menentang secara terang-terangan SI sebagai kekuatan politik, dan mengubah SI merah menjadi Sarekat Rakyat (SR) sebagai organisasi yang berada dibawah PKI. Pemerintah Hindia Belanda melihat bahwa kekuatan komunis sudah mulai berkembang dan semakin menyebabkan ancaman karena aksi yang dilakukan anggotanya. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mengusir tokoh-tokoh komunis seperti Muso, Alimin, Darsono dan Semaun. Tokoh-tokoh ini menyebar ke Asia hingga Eropa. Namun tidak lama kemudian pada akhir tahun 1923 tokoh-tokoh komunis tersebut kembali ke Hindia Belanda.

Ternyata kepergian mereka meninggalkan Hindia Belanda telah mengakibatkan kelemahan dalam kepemimpinan Perserikatan Komunis di Hindia Belanda. Untuk kembali membangkitkan kekuatan komunis tersebut, Semaun dan Darsono mencoba untuk menghimpun kembali kekuatan dengan melakukan kongres pada Juni 1924 di Jakarta. Pada saat itulah nama Partai Komunis Indonesia (PKI) resmi digunakan. Kongres tersebut juga memutuskan untuk memindahkan markas besar PKI dari Semarang ke Batavia (sekarang

Jakarta) dan memilih pimpinan baru yaitu Alimin, Musso, Aliarcham, Sardjono dan Winanta. Dalam kongres tersebut juga diputuskan untuk membentuk cabang cabang di Padang, Semarang, dan Surabaya.

Komunisme ternyata telah berhasil memecah bela SI kedalam dua bagian. Bagian pertama adalah mereka yang mempunyai pandangan komunis dalam tubuh SI dan bagian yang kedua adalah mereka yang menentang ajaran komunisme dalam tubuh SI. Sekalipun akibat ulah dari komunisme SI mengalami penurunan dalam jumlah anggotanya, tapi bagi pimpinan SI hal ini harus dilakukan untuk menyelamatkan SI itu sendiri. Atas peristiwa tersebut SI dan PKI pun menjadi dua kekuatan politik yang berdiri sendiri dan saling melakukan persaingan dalam mendapatkan simpati/dukungan dari rakyat.

II.1.3. PKI Sebagai Instrumen Komunis Internasional (Komintern)

Komintern merupakan sebuah wadah bagi perhimpunan partai-partai komunis di dunia. Komintern merupakan organisasi tertinggi bagi partai tertinggi bagi beberapa negara di dunia. Kongres Pertama Komintern dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1919. Dalam kongres pertama ini menghasilkan menghasilkan sebuah bentuk perjuangan yang berskala internasional. Dalam kongres ini juga ditetapkan apa yang menjadi statuta (aturan dasar) dari organisasi tersebut. Badan tertinggi dari Komintern adalah kongres tahunan yang wajib diikuti oleh seluruh anggotanya. Kemudian di bawah kongres ada Komite Eksekutif yang disebut sebagai EKKI (Eksekutif Komite Komunis Internasional). EKKI bertugas untuk memberikan petunjuk dan mengontrol aktivitas dari setiap anggota komintern.

Kongres Komintern yang kedua berlangsung pada tanggal 17 Juli -7 Agustus 1920 di Moskow. Pada kongres ini lebih menekankan kepada makna propaganda. Setiap anggotanya

diwajibkan untuk mendukung gerakan revolusioner di negara jajahan tidak hanya dengan kata-kata semata tetapi harus juga dengan tindakan. Pada kongres ini juga dibentuk sebuah komisi yang mengatasi masalah-masalah Nasional dan Kolonial. Komisi ini dipimpin oleh Lenin dan Sneevliet sebagai sekertarisnya. Pada kesempatan ini, Sneevliet juga menceritakan tentang pengalamannya di Hindia Belanda dalam menaburkan benih komunisme di daerah tersebut.

Komintern melakukan kongres ketiganya pada tanggal 22 Juni - 12 Juli 1921 yang dihadiri oleh 98 utusan partai komunis dari beberapa negara di dunia. Pada saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengutus Darsono sebagai wakilnya. Pada kongres kali ini dibahas mengenai struktur, metode dan aksi-aksi dari setiap partai komunis. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 5 Nopember - 5 Desember 1922 Komintern melaksanakan kongresnya yang keempat. Pada saat itu PKI mengirimkan Tan Malaka sebagai wakilnya. Pada kesempatan ini Tan Malaka menyampaikan mengenai keberadaan Pan Islamisme di Hindia Belanda. Tan Malaka menjelaskan bahwa gerakan Pan Islamisme bukanlah musuh komunis, tetapi harus di dukung keberadaannya karena menganut paham anti-imperialisme dan kapitalisme. Pada kesempatan ini Tan Malaka mengambil contoh pergerakan Sarekat Islam di Jawa yang secara terang-terangan menentang pemerintahan imperialis Hindia Belanda.

Pada Agustus 1924 dilakukan kongres kelima Komintern yang membahas mengenai tugas-tugas dari kongres. Kemudian dirumuskan bahwa kongres bertugas untuk merumuskan secara konkrit yang menjadi kebijakan nasional Komintern di beberapa negara, terutama di negara-negara jajahan. Dalam kongres juga dibahas mengenai keharusan bagi setiap partai komunis anggota Komintern untuk membentuk organisasi buruh yang secara langsung berada dibawah partai dan mendapat kontrol langsung dari partai tersebut. Salah satu agenda yang dibahas pada saat itu adalah mengenai keberadaan Sarekat Rakyat (SR) dan PKI.

Pelaksanaan-pelaksanaan kongres Komintern yang terjadi dari tahun-ketahun tidak pernah terlewatkan oleh PKI. Hal ini tidak saja dibuktikan dengan hadirnya perwakilan PKI pada kongres tersebut, melainkan juga adanya pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi pada tubuh PKI didalam kongres Komintern tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PKI merupakan bagian dari Komintern dan turut berperan aktif dalam setiap agenda-agenda yang dilakukan oleh Komintern. Atas dasar penjelasan diataslah tidak ada lagi keraguan bahwa PKI merupakan salah satu instrumen dari persatuan organisasi komunis terbesar di dunia yang bernama Komintern.

II.2. Pergerakan Komunisme Pada Masa PraKemerdekaan.

II.2.1. Pergolakan PKI 1926/1927

Pergolakan yang dilakukan PKI pada tahun 1926 merupakan sebuah bukti bahwa apa yang terjadi pada kongres tahun 1924 di kota gede Yogyakarta tidak mendapatkan kesepakatan bersama dari pimpinan pimpinan PKI pada saat itu. Setelah dilangsungkannya kongres di Yogyakarta tersebut, PKI memerintahkan untuk mengadakan mogok besar-besaran dikalangan para buruh. Hal ini sontak saja membuat pemerintah Hindia Belanda berang melihat ulah PKI tersebut. Pemerintah Hindia kemudian mengambil tindakan tegas terhadap tokoh-tokoh PKI dan semakin memperketat aktivitas mereka. Pada tahun 1925 Darsono diusir keluar Indonesia, Aliarcham dibuang ke Digul, sedangkan Alimin, Musso dan Tan Malaka terpaksa menyingkir ke luar negeri.²⁸ Sementara tokoh tokoh PKI yang masih bebas seperti Budisutjitro, Sugono, Suprodjo, dan lainnya mengadakan rapat di Prambanan untuk membicarakan keberadaan PKI yang semakin mengancam keberadaannya karena aktivitasnya telah dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda.

²⁸ Ibid, Hal. 17

Pada bulan Januari 1926 ternyata beberapa tokoh PKI seperti Alimin, Sanusi, Subakat, Winanta, Musso, Sugono dan Budisutjito telah berkumpul di Singapura untuk membicarakan keputusan Prambanan. Kemudian mereka memutuskan Alimin untuk menemui Tan Malaka dan membicarakan mengenai keputusan Prambanan tersebut. Pada bulan Maret 1926, keputusan itu diterima oleh Tan Malaka dari Alimin di Manila. Tan Malaka kemudian menilai bahwa keputusan tersebut terlalu tergesa-gesa untuk dilakukan. Ia menilai bahwa pada saat itu PKI belum tepat untuk melakukan pemberontakan, dengan alasan PKI belum solid dan basis massa yang belum sepenuhnya sadar dan revolusioner.²⁹ Kemudian Tan Malaka menjelaskan bahwa keputusan itu tidak *legitimate* karena belum dibicarakan dalam Komintern. Tan Malaka menjelaskan bahwa PKI merupakan salah satu anggota Komintern, jadi setiap pergerakan yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dibahas dalam Komintern. Pada kesempatan itu Tan Malaka lima alasan sebagai nasehat politik, yaitu;³⁰

1. Putusan Prambanan tersebut diambil tergesa gesa, kurang dipertimbangkan secara matang
2. Putusan semata-mata karena provokasi dari pihak lawan dan tidak seimbang dengan kekuatan sendiri
3. Putusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Komintern
4. Tidak cocok dengan taktik dan strategi komunis, ialah massa aksi
5. Kalaupun dilaksanakan akibatnya akan sangat banyak merugikan pergerakan rakyat di Indonesia.

Kemudian diantara Alimin dan Tan Malaka pun terjadi dialog mengenai pergerakan yang dilakukan oleh PKI. Namun tetap saja Tan Malaka menolak rencana pemberontakan yang akan dilakukan tersebut. Tan Malaka mengungkapkan ada empat alasan mengapa dia menolak keputusan prambanan tersebut; pertama, Tan Malaka melihat bahwa sebelumnya melakukan sebuah pergolakan hendaknya sebelumnya partai harus dipastikan dalam keadaan

²⁹ Fahsin, *Negara dan Revolusi Sosial: Pokok Pokok Pemikiran Tan Malaka*, Yogyakarta: Resist Book, 2005, Hal. 128

³⁰ Ibid, Hal 129-130

yang baik, kedua; kekuatan buruh dan tani belum terorganisir dengan baik, ketiga, masih banyak rakyat dan kekuatan lain yang belum terikat dengan PKI, dan keempat, kekuatan imperialis di sekitar Indonesia (Inggris, AS, Prancis) masih terlalu kuat dan bersatu. Dengan kata lain Tan Malaka menolak pemberontakan ini dilakukan. Namun Tan Malaka melihat bahwa Komintern merupakan pihak yang paling mempunyai otoritas dalam hal ini karena PKI merupakan salah satu instrumen Komintern.

Mendengar penolakan yang dilontarkan oleh Tan Malaka tersebut, maka Alimin kembali lagi ke Singapura untuk membahas kembali Keputusan Prambanan tersebut. Sesampainya di Singapura Alimin menceritakan penolakan beserta alasan yang diberikan Tan Malaka kepada tokoh-tokoh PKI di Singapura. Alimin tidak menghiraukan saran dari Tan Malaka dan memutuskan untuk pergi ke Moskow bersama Musso untuk meminta pendapat dari Komintern. Salah satu tokoh PKI Sardjono yang masih tinggal di Singapura mengirim surat kepada Tan Malaka dengan pernyataan menolak saran dari Tan Malaka tersebut dan tetap akan melakukan pemberontakan (Revolusi). Hal ini menjadi tanda bahwa PKI tidak lagi sejalan dengan Tan Malaka. Dan ini menjadi awal lepasnya Tan Malaka dari sebuah partai yang dulu diharapkan dapat menjadi pelopor bagi pembebasan bangsanya dari penjajahan.

Setelah Alimin dan Musso sampai di Moskow mereka langsung mendiskusikan keputusan Prambanan tersebut kepada Stalin dan Trostky. Secara terang-terangan Stalin menolak rencana tersebut karena memang ia menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang tergesa-gesa dan tanpa perhitungan yang matang. Stalin pun memerintahkan mereka kembali ke Indonesia. Musso menolak keputusan Stalin tersebut dan berinisiatif untuk tetap melakukan pemberontakan tersebut. Namun sebelum Musso dan Alimin sampai ke Indonesia pergolakan sudah meletus.

Pada saat subuh dan fajar menyingsing tepatnya tanggal 12 Nopember 1926 PKI melancarkan perampasan gedung telepon dan telegraf di Batavia (Jakarta). Namun pada pagi harinya tentara Belanda berhasil merebut kembali bangunan strategis tersebut, dan dalam waktu sepekan saja pemberontakan 1926 tersebut dapat diakhiri.³¹ Jelas saja pemberontakan ini dapat dipatahkan dengan mudah, karena kurang perencanaan yang matang dan musuh masih terlalu kuat. Atas pemberontakan ini, pemerintah Hindia Belanda semakin mengawasi gerak-gerik para tokoh-tokoh komunis dan bahkan Belanda menangkap sebanyak 13.000 aktivis kiri pada saat itu dan menahan sebagian dari mereka sesuai dengan undang-undang yang melarang adanya pemberontakan. Sedangkan tokoh-tokoh PKI menjadi buronan bagi pemerintah Hindia Belanda sehingga banyak dari mereka harus melarikan diri ke luar negeri.

II.2.2. Pergolakan PKI 1928 (Gerakan PKI Ilegal)

Setelah pemberontakan yang dilakukan PKI pada tahun 1926/1927 gagal, para tokoh tokoh komunis pun semakin rawan keberadaannya di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memerintahkan secara khusus Polisi Pengawasan Politik untuk menangkap para kader PKI. Hal tersebut jelas membuat PKI menjadi tercerai-berai karena mereka selalu mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Para pimpinan PKI pun hanya dapat melakukan pertemuan di luar negeri saja, sehingga kekuatan yang mereka susun tidak terbangun secara optimal.

Kebangkitan PKI mulai terlihat setelah di laksanakannya kongres keenam Komintern pada bulan Agustus 1928 di Moskow. Agenda yang dibahas pada saat itu masih seputar mengenai kegagalan kudeta yang dilakukan di Indonesia. Tokoh tokoh PKI yang hadir pada

³¹ Aco Manafe, *Teperpu: Mengungkap Pengkhiantan PKI Pada Tahun 1965 dan Proses Hukum Bagi Para Pelakunya*, Jakarta: Sinar Harapan, 2008. Hal. 4

saaat itu seperti Musso, Tan Malaka dan Semaun mengalami perselisihan sepanjang jalannya kongres. Hal ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai tindakan dari keputusan Prambnan tersebut. Perselisihan ini membuat kepemimpinan didalam tubuh PKI menjadi terpecah.

Karena telah mencoba untuk melakukan pemberontakan, pemerintah Hindia Belanda menjadi sangat anti dengan nama komunisme. Gerakan yang dilakukan PKI baru mulai nampak ketika terbentuknya Sarekat Kaum Buruh Indonesia (SKBI). Namun aktivitas mereka di curigai, dan beberapa tokoh SKBI ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1932 mereka bangkit kembali dengan membentuk komite persatuan yang di sistemnya lebih dikenal dengan nama Organisasi Sel. Komite ini terus menerus melakukan tuntutan revolusionernya antara lain menuntut pembebasan bagi tahanan-tahanan politik yang selama ini ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 30-an muncul kekutan baru didunia yang dipelopori oleh Musolini di Italia dan Hitler di Jerman. Kedua kekutan ini bergerak dbawah bendera yang sama yaitu fasisme.³² Kekutan fasisme pada saat itu begitu kuat, sehingga Stalin menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki oleh fasisme jauh lebih berbahaya daripada kapitalisme. Untuk itu komunisme mengambil langkah untuk menghentikan sementara perlawanannya terhadap kapitalisme dan sebaliknya justru menggalang kekuatan bersama kaum kapitalis yang anti fasis untuk kemudian melawan kekuatan fasis tersebut. Perubahan sikap ini tidak terlepas dari terpilihnya pimpinan baru komintern yaitu Dimitrov pada tahun 1935.

Komunisme telah mempunyai garis perjuangan yang berbeda, sehingga tokoh komunis yang pada saat itu masih berada di Moskow dikirim pulang ke negaranya masing masing. Musso diperintahkan oleh Komintern untuk pulang ke Indonesia dan menjelaskan perubahan garis perjuangan komunisme tersebut. Pada tahun yang sama, Musso sudah

³² Fasisme merupakan ideologi yang berpaham otoriter dan tindakannya bersifat totaliter serta menolak komunisme dan kapitalisme.

sampai di Surabaya, dan menggalang kekuatan bersama tokoh tokoh PKI yang masih melakukan pergerakan dibawah tanah seperti Sudjono, Pemudji, Sukindar dan lain lain. Musso kemudian membentuk Central Comite (CC) PKI baru pada tahun 1935. Kelompok ini bertugas untuk membina tokoh-tokoh muda menjadi orang yang mempunyai pemikiran revolusioner. Tokoh yang kemudian dapat dijaring oleh kelompok ini adalah Tan Liang Djie dan Mr. Amir Sjarifuddin.

Pergerakan PKI mengalami perubahan sejak kembalinya Musso dari Moskow. Kader kader PKI justru disarankan untuk masuk kedalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebuah gerakan yang terbentuk pada tahun 1937 dan memiliki azas kooperasi dengan pemerintah Belanda. Hal ini dikarenakan sikap Gerindo yang dengan tegas anti-fasis sehingga menarik perhatian dari kader-kader PKI. Didalam Gerindo inilah kemudian kader-kader PKI (terutama kader muda) di berikan pemahaman mendalam mengenai doktrin komunisme. Pemuda pemuda yang terkader pada saat itu antara lain adalah Wikana, D.N. Aidit, Sudisman, Anwar Kadir, Tjugito dan Mr. Joseph.

PKI melihat bahwa kekuatan fasisime telah sampai ke Asia yang dibawah oleh jepang. Jepang mulai menaruh perhatiannya ke Indonesia yang pada saat itu masih berada dibawah pimpinan pemerintah Hindia Belanda. Para tokoh PKI telah melihat situasi tersebut dan memutuskan untuk membentuk gerakan anti fasis (Geraf). Geraf dipimpin langsung oleh Amir Sjarifuddin, Pamudji dan Sukayat dan menempatkan dr. Tjipto Mangunkusumo sebagai dewan penasehatnya. Apa yang telah menjadi kekhawatiran PKI selama ini ternyata menjadi kenyataan. Kekuatan fasis Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menjadi penguasa baru di Indonesia.

Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, Amir Sjarifuddin mulai melakukan perlawanan bersama kelompoknya. Namun gerakan yang dilakukan lebih sering bersifat

organisasi bawah tanah. Namun pada Februari 1943 ia bersama 300 anggota kelompoknya berhasil ditangkap oleh Jepang. Amir Sjarifuddin dan pimpinan Gerak lainnya seperti Sukayat, Pamudji, Abdulrachim, dan Abdul Azis dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Jepang. Atas permintaan Soekarno-Hatta hukuman Amir Sjarifuddin diubah menjadi hukuman seumur hidup. Sementara pimpinan Gerak lainnya tetap menjalani hukuman mati.

Memasuki era pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang, gerakan komunisme di Indonesia jelas terang-terangan telah berubah haluan. Komunis yang sebelumnya selalu melakukan perlawanan terhadap kapitalis pemerintah Hindia Belanda kini justru menempatkan Jepang sebagai musuh baru dalam perjuangan politiknya. Hal ini tidak terlepas dari apa yang terjadi di Eropa saat itu, dimana Moskow sebagai pusat kekuatan komunis di dunia mulai merasa terancam dengan keberadaan Italia dan Jerman yang bersatu dalam kekuatan fasis. Hal ini membuat Komintern mengambil kebijakan untuk memerintahkan seluruh anggotanya (termasuk PKI) untuk melakukan perlawanan terhadap fasisme. Bahkan Komunisme menjalin kerjasama dengan kapitalisme yang anti-fasis untuk melawan kekuatan fasisme itu sendiri. Hal ini disebabkan, karena tokoh Komintern di Moskow menganggap bahwa kekuatan fasisme jauh lebih berbahaya dari kekuatan kapitalisme itu sendiri, sehingga perlawanan terhadap fasisme tersebut harus diprioritaskan terlebih dahulu.

II. 3. Pergerakan Komunisme di Masa Kemerdekaan

II.3.1. Pergerakan Komunisme di Awal Kemerdekaan (Merebut Kekuasaan Pemuda dan Buruh)

Kekalahan Jepang dari tentara sekutu yang diboncengi Belanda telah membawa angin segar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Indonesia secara cermat melihat perang

pasifik sebagai sebuah peluang untuk memerdekakan diri. Penarikan pasukan besar besaran yang dilakukan oleh Jepang dari Indonesia sebagai sebuah perlawanan atas serangan Amerika di Jepang telah mengakibatkan melemahnya kekuatan Jepang di Indonesia. Soekarno dan Hatta bersama tokoh-tokoh kebangsaan lainnya serta dukungan dari kalangan pemuda menggagas diproklamsikannya Indonesia menjadi sebuah negara merdeka. Sekalipun awalnya terdapat perbedaan-pendapat diantara pihak pemuda dan Soekarno-Hatta, namun tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi negara Indonesia resmi dikumandangkan. Soekarno dan Hatta pun kemudian ditunjuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pengalihan kekuasaan dari tangan penjajah ke tangan bangsa sendiri membawa keuntungan tersendiri bagi keberadaan komunis di Indonesia. Hal ini dikarenakan semua tahanan politik PKI yang ditahan pada masa penjajahan Jepang secara sendirinya dibebaskan. Pembebasan tahanan tahanan politik PKI ini jelas akan membuat kekuatan komunis semakin kuat. Komunis akan kembali melakukan penggalangan kekuatan melalui eks tahanan PKI di masa penjajahan Jepang tersebut. Salah satu tahanan PKI yang dibebaskan pada saat itu adalah Amir Sjarifuddin. Amir Sjarifuddin dibebaskan dari penjara Malang pada bulan September 1945. Bahkan nama Amir Sjarifuddin masuk kedalam kabinet pemerintahan Indonesia yang pertama sebagai Menteri Penerangan.

Setelah bergulirnya masa kemerdekaan organisasi-organisasi masyarakat mulai tumbuh dimana-mana, namun organisasi pemuda lah yang paling banyak kebedaannya. Amir Sjarifuddin melakukan konsolidasi terhadap kelompoknya di Surabaya untuk membentuk Angkatan Muda Indonesia (AMI). Organisasi ini terbentuk pada tanggal 20 September 1945 yang dipimpin oleh Roeslan Abdulgani. Pada awalnya organisasi ini sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan komunis. Namun seiring dengan waktu kader-kader komunis mulai menguasai organisasi ini. Amir Sjarifuddin juga mempelopori berdirinya Pemuda Republik Indonesia (PRI). Pada awalnya organisasi ini juga tidak

berhaluan komunis, namun kepengurusannya dikuasai oleh Soemarsono, Krissubanu, dan Ruslan Widjasastra yang notabene adalah kelompok dari Amir Sjarifuddin itu sendiri. Dengan adanya PRI ini, kelompok Amir Sjarifuddin secara tidak langsung telah menancapkan kekuatannya di Surabaya.

Dengan begitu banyaknya organisasi pemuda yang tumbuh di awal kemerdekaan, maka muncul sebuah ide untuk menyatukan organisasi kepemudaan kedalam satu wadah organisasi baru yang sifatnya menyeluruh. Pada tanggal 6 Nopember 1945 organisasi-organisasi kepemudaan mengadakan pertemuan di Yogyakarta. Pertemuan ini kemudian menyepakati untuk mengadakan kongres pada tanggal 10-11 Nopember di Yogyakarta. Pada saat itu kongres dihadiri oleh 332 peserta yang menjadi utusan dari 30 organisasi kepemudaan. Chaerul saleh menjadi pimpinan dalam kongres tersebut.

Didalam arena kongres terdapat tiga kekuatan yang mencoba untuk menguasai jalannya kongres. Ketiga kekuatan tersebut adalah kekuatan sosialis yang di komandoi oleh Sutan Sjahrir, kelompok komunis yang dikomandoi oleh Amir Sjarifuddin dan satu lagi adalah kelompok Tan Malaka. Yang perlu di sadari adalah bahwa ketiga kelompok ini pada awalnya berasal dari satu kekuatan komunis yang akhirnya terberai karena ketidaksamaan paham diantara sesamanya. Sejalan dengan berlangsungnya kongres, Amir Sjarifuddin menyusun rencana untuk menguasai arena kongres. Kelompok Amir Sjarifuddin akhirnya meleburkan diri dengan kelompok sosialis dan memusikan diri kedalam organisasi baru yaitu Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Dan seperti biasanya, kelompok Amir Sjarifuddin sangat mendominasi dalam kepengurusan di Pesindo tersebut. Karena kondisi tersebut kelompok Sjahrir berusaha untuk menarik diri dari aliansi Pesindo tersebut. Namun hanya sedikit yang mau meninggalkan Pesindo sedangkan yang lainnya lebih memilih untuk bertahan.

Komunisme tidak hanya menggunakan pemuda sebagai upaya terhadap penggalangan kekuatan mereka. Mereka juga menaruh perhatiannya terhadap kelompok buruh. Dalam ajaran komunisme, buruh merupakan kekuatan pokok dalam melakukan sebuah revolusi. Setiap partai komunis diwajibkan untuk mengagasi dan membina terbentuknya organisasi buruh. Setelah Indonesia merdeka, muncul organisasi buruh yang bernama Barisan Buruh Indonesia (BBI). Organisasi BBI tersebut dibentuk di Jakarta dipimpin oleh Koesnaini. Pada tanggal 6 September 1945 terjadi pergantian pimpinan di dalam tubuh BBI, yaitu dari Koesnaini kepada Nyono.

Nyono kemudian menemui menteri sosial saat itu Koesoemasoemantri untuk meminta supaya KNI mengakui BBI sebagai satu satunya organisasi buruh. Koesoemasoemantri kemudian menyarankan agar dilakukan sebuah pertemuan akbar untuk menyatukan pendapat dan antara semua anggota BBI dan menetapkan Surabaya sebagai tempat berlangsungnya pertemuan tersebut. Namun hal ini ditolak oleh BBI Jakarta karena menganggap bahwa Jakarta adalah pusat dari sebuah organisasi sehingga pertemuan tersebut harus dilaksanakan di kota mereka. BBI Surabaya yang diwakili oleh Trspirin menganggap bahwa Surabaya lebih layak untuk menggelar pertemuan tersebut. Untuk menghindari perselisihan yang sudah timbul di awal ini maka diambil jalan tengah dengan mengadakan pertemuan tersebut di Surakarta yang direncanakan berlangsung pada tanggal 7-9 Nopember 1945. Karena pertemuan tersebut bersifat nasional, maka nama pertemuan tersebut di ubah menjadi kongres yang dihadiri oleh kurang lebih 3.000 peserta dari 817 utusan seluruh Jawa. Sementara dari organisasi buruh Sumatera diwakili oleh 5 orang utusan.

Agenda utama yang dibahas dalam kongres tersebut adalah mengenai arah perjuangan buruh setelah Indonesia merdeka. Pada saat itu ada dua kelompok yang berusaha untuk mempertahankan aargumennya di arena kongres. Kelompok pertama adalah perwakilan dari Jawa Timur yang mengutus Sjamsoe Harja-Oedaja (Ketua BBI Surabaya) sebagai juru bicara

mereka. Ia mengatakan bahwa tujuan utama dari perjuangan buruh yang sebenarnya adalah untuk mengisolir seluruh perusahaan yang dianggap vital menjadi kepemilikan rakyat seluruhnya. Oleh sebab itu garis perjuangan organisasi buruh harus diperjelas. Ia juga mengusulkan untuk membentuk suatu partai politik yang bernama Partai Boeroeh Indonesia (PBI) dan membubarkan BBI.

Sementara kelompok yang satu lagi yaitu kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nyono. Nyono menjelaskan bahwa tujuan perjuangan buruh haruslah sejalan dengan afiliasi diantara kekuatan komunis dan sosialis. Ia juga menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar perjuangan buruh adalah front persatuan dengan menentang penjajahan dan memberikan bantuan ekonomi kepada buruh. Dan dia juga tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sjamsoe Harja-Oedaja yaitu untuk membubarkan BBI. Namun kongres ternyata lebih menerima saran yang dianjurkan oleh Sjamsoe Harja-Oedaja yang berarti membentuk PBI dan membubarkan BBI. Sampai pada akhirnya kongres, masalah setuju tidaknya BBI dibubarkan masih menjadi agenda panas pembahasan. Apa yang terjadi pada kongres buruh tersebut tidaklah jauh berbeda dari apa yang terjadi pada kongres organisasi pemuda yang telah dijelaskan sebelumnya. Arena kongres selalu diwarnai dengan pertarungan dari dua kekuatan, yaitu kekuatan dari kelompok sosialis/ komunis (Nyono) dan kekuatan kelompok Tan Malaka (Sjamsoe Harja Oedaja).

Kongres pertama PBI dilangsungkan pada 15 Desember 1945 di Yogyakarta yang dihadiri oleh 28 utusan dari 19 cabang. Pembahasan yang paling menonjol berkisar pada kedudukan buruh dan tani. Sjamsoe Harja Oedaja menganggap bahwa kekuatan tani harus dileburkan kedalam PBI, sementara Wijono Soerjoekoesumo (peninjau kongres) menolak pendapat dari Sjamsoe Harja Oedaja tersebut. Wijono melihat bahwa kelompok tani bukanlah organisasi politik, dan lagi pula tani telah mempunyai organisasinya sendiri yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI). Kongres BTI telah menyatakan bahwa buruh dan tani merupakan dua

kelompok sosial yang berbeda oleh sebab itu BTI memecah jika kaum tani berusaha dileburkan kedalam PBI.

Setelah kongres selesai dilaksanakan, maka timbul sebuah pergolakan didalam tubuh PBI, mereka adalah kelompok yang menolak dibubarkannya BBI yang di komandoi oleh Nyono. Karena desakan yang diterima begitu kuat, maka pada awal tahun 1946 BBI di hidupkan kembali keberadaannya namun statusnya sebagai asosiasi sarekat buruh. Sejalan dengan perkembangannya, BBI berganti nama menjadi Gabungan Sarekat Buruh Indonesia (GASBI). Untuk menyusun kepengurusan dari Gasbi tersebut, maka diadakanlah sebuah konfrensi oleh PBI pada tanggal 21 Mei 1946 di Madiun. Konfrensi itu akhirnya memutuskan Sjamsoe Harja Oedaja (ketua PBI) sebagai ketua Gasbi. Namun Gasbi tidak hanya terdiri atas organisasi organisasi buruh saja, melainkan juga terbuka bagi organisasi Polisi, tentara dan pegawai negeri.

Pergerakan komunisme diawal kemerdekaan berkisar mengenai usaha ideologi ini untuk menggalang kekuatan kembali pasca zaman penjajahan. Penggalangan kekuatan di konsolidasikan pada golongan golongan pemuda, buruh, tani dan pekerja pekerja lainnya. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali kekutan komunis setelah sebelumnya di bantai oleh pemerintahan penjajahan Belanda dan Jepang. Diawal masa kemerdekaan, ideologi ini dapat disebarakan dengan begitu bebas karena tidak mendapat pengawasan seperti yang telah dialami pada masa penjajahan sebelumnya.

II.3.2. Pergerakan PKI di Madiun 1948 (Sebuah Usaha Kudeta Yang Gagal)

Kejatuhan kabinet Amir Sjarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948 menandai bahwa kekuatan komunis mulai mendapat ancaman serius dari musuh musuh politiknya. Kelompok

sayap kiri tidak mendapat tempat dalam komposisi pemerintahan yang formaturnya dipegang langsung oleh Hatta. Dengan situasi ini, Amir Sjarifuddin dan kelompoknya menyatakan sikap oposisi terhadap pemerintah. Pada tanggal 26 Februari 1948, Amir Sjarifuddin membentuk sebuah organisasi yang bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Solo.

Pada tanggal 10 Agustus 1948 Musso datang ke Indonesia setelah sebelumnya telah lama bermukim di Moskow. Musso menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk mengoreksi pergerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Kehadiran Musso merupakan sebuah perintah yang dilakukan oleh komintern. Musso melihat bahwa PKI harus mengganti sifat revolusinya yang selama ini defensif menjadi lebih ofensif. Tidak lama kemudian Musso langsung mengambil alih kepemimpinan PKI yang sebelumnya dipegang oleh Sardjono.

Polit Biro CC PKI pada tanggal 24 Agustus 1948 mengumumkan untuk membentuk satu partai kelas buruh. CC PKI kemudian mengusulkan untuk memfusikan komponen-komponen yang selama ini tergabung dalam FDR yaitu PKI, Partai Sosialis dan PBI kedalam satu partai buruh yang memakai nama PKI. Dalam perkembangan selanjutnya, Partai Buruh juga meleburkan diri kedalam PKI tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1948. FDR kemudian menyusun kepengurusannya yang sepenuhnya diambil alih PKI. Dengan begitu gerakan yang dilakukan oleh FDR murni menjadi gerakan yang dikendalikan oleh PKI. Kehadiran Musso jelas membawa angin segar bagi aktivitas PKI di Indonesia.

Pada tanggal 10 September 2008 diadakan rapat besar di Madiun yang dihadiri oleh Musso dan Amir Sjarifuddin. Setelah rapat besar ini selesai digelar, kota Madiun lama kelamaan makin ramai oleh orang-orang yang tidak dikenal. Terjadi penculikan dimana-mana sehingga kondisi ini membuat warga semakin ketakutan karena situasi yang sangat

mengancam. Tempat tempat sentral seperti pasar, sekolah sekolah, stasiun kereta api lambat laun berhasil dikuasi oleh kekuatan PKI. Bahkan kepala kepolisian kerseidenan madiun Komisatis besar Sunaryo tidak luput dari aksi penculikan tersebut. Dengan lain kekuatan PKI telah begitu dominan menguasai Madiun.

Pada tanggal 18 september 1948 dini hari terdengar letusan letusan senjata di Madiun yang menandai bahwa gerakan telah dimulai. Sasaran utama yang menjadi serangan kelompok PKI adalah rumah residen Madiun, Samadikun. Karesidenan pun di kepung oleh pasukan PKI dan menangkap semua orang yang ada didalmnya. Namun kebetulan pada saat itu residen Samadikun sedang tidak ada di kediamannya. Setelah semua orang dalam karasidenan dapat dikuasai maka bersamaan dengan itu Soemarsono dan Supardi memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan membentuk Pemerintahan Front Nasional. Dengan begitu Pemerintahan Front Nasional akan menjadi tandingan bagi Pemerintahan Republik Indonesia.

Aksi PKI di Madiun tersebut tidak sepenuhnya mendapat sambutan hangat dari warga madiun. Kelmpok pelajar di madiun bahkan secara terang terangan mengambil sikap yang bersebrangan dengan apa yang telah dilakukan PKI tersebut. Namun PKI mengambil tindakan tegas atas setiap tindakan yang menentang Pemerintahan Front Persatuan yang telah mereka bentuk. Karena bagi mereka Pemerintahan Front Persatuan adalah satu satunya pemerintahan yang harus diakui keberadaannya. Kondisi jelas semkain membuat PKI yakin bahwa mereka telah benar benar menguasai madiun.

Pada desember 1948 pasukan pemerintahan Indonesia merencanakan serangan ke karesidenan Madiun tempat para pimpinan PKI. Penyerangan ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto yang notabene adalah Pati Solo-Madiun. Pada tanggal 4 Desember 1948 Musso dan Sjarifuddin tewas tertembak, pasukan rakyat dan TNI pun berhasil kembali

menduduki kota madiun. Tokoh tokoh PKI lainnya seperti Alimin, D.N. Aidit, Nyoto, Soemarsono, Tan Ling Djie dan lain lain memlih utnuk melarikan diri. Karena aksi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun ini bersamaan dengan adanay aksi militer Belanda kedua, maka pengejaran terhadap tokoh tokoh Komunis yang masih tersisa menjadi terbengkalai.